

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian mengenai Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per kapita ini dimotivasi oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Adi (2006), Harianto (2007), Darwanto (2007) dan Bati (2009). Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) yang meneliti mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah memberikan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Apabila pemerintah daerah dapat memfasilitasi dan mengoptimalkan berbagai sektor yang ada, maka akan memberikan kemudahan dan peluang bagi para investor untuk berinvestasi. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak dan retribusi yang menjadi andalan terbesar PAD akan semakin besar dan meningkat. Belanja pembangunan memberikan pengaruh terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi, jadi diharapkan pemerintah bisa menambah porsi untuk belanja pembangunan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian yang diteliti oleh Harianto (2007) mengenai hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita menunjukkan bahwa dana alokasi umum sangat berpengaruh terhadap belanja modal. Sayangnya kontribusi dari dana alokasi umum terhadap belanja modal masih kurang efektif akibatnya pembangunan yang terjadi di daerah kurang

merata. Belanja modal tidak mempunyai pengaruh secara langsung terhadap pendapatan per kapita, karena dalam penelitian ini, meningkatnya pendapatan per kapita menyebabkan menurunnya belanja modal. Pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. Apabila PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah akan meningkat pula sehingga dapat mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya dapat pula meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. Dana alokasi umum berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui belanja modal, apabila pemerintah daerah memanfaatkan belanja modal untuk memperbaiki infrastruktur yang dapat mendorong produktifitas masyarakat.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal yang diteliti oleh Darwanto (2007) memperlihatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, tetapi belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena apabila belanja modal dioptimalisasikan untuk membangun sarana dan prasarana untuk memfasilitasi layanan publik maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi. PAD dan DAU memiliki hubungan terhadap belanja modal, besarnya jumlah DAU yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan menentukan bagaimana pemerintah daerah bisa membelanjakannya secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat .

Penelitian yang dilakukan oleh Bati (2009) mengenai pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada

kabupaten dan kota di Sumatera Utara) memberikan hasil bahwa belanja modal dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa belanja modal yang digunakan untuk memperbaiki kegiatan infrastruktur dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dan hasil yang didapat adalah meningkatnya pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Utara tersebut.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Pengertian pertumbuhan ekonomi seringkali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, Situngkir (2009).

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, Sularso (2011). Meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat

dilihat dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya, PDRB diukur atas dasar harga konstan di suatu daerah, Maryati (2010).

Menurut Sularso (2011) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan terwujud apabila ada kerjasama seluruh anggota pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akan berdampak pada kemakmuran dan kemandirian daerah dan secara otomatis menambah investasi di daerah tersebut. Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, Tambunan (2009:44).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini berhubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan pada setiap tahun. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi harus lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk, agar peningkatan pendapatan per kapita dapat tercapai.

Darwanto (2007) mengemukakan akan pentingnya peran pemerintah, dengan mengemukakan sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan per kapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang menaik. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa pendapatan per kapita akan mengalami kenaikan terus menerus, Arsyad (1999:13). Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi Harianto (2007).

### 2.2.2 Belanja Pembangunan (Modal)

Menurut Halim (2004:73), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Senada dengan Christy (2009) yang mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan

kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Namun untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli. Belanja yang mengakibatkan penambahan kekayaan (asset) adalah belanja modal, Bastian (2003:86).

Bati (2009) mengatakan, dengan adanya belanja modal yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita penduduk. Belanja modal diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu :

- 1) Belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat langsung dinikmati masyarakat, misalnya: pembangunan jembatan, pembelian mobil ambulans untuk umum dan lain-lain.
- 2) Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak dinikmati langsung oleh masyarakat tetapi dapat dirasakan langsung oleh aparatur, misalnya: pembangunan gedung dewan, pembelian mobil dinas dan lain-lain, Sularso (2011).

Menurut Situngkir (2009) aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah

akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dapat dibedakan dalam lima macam, yaitu:

- a) Belanja modal tanah
- b) Belanja modal peralatan dan mesin
- c) Belanja modal gedung dan bangunan
- d) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
- e) Belanja modal fisik lainnya

Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah, Abimanyu (2005) dalam Harianto (2007). Pengalokasian dana belanja modal untuk kesejahteraan khususnya di bidang pendidikan, diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Christy (2009). Belanja modal memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Belanja modal yang dibelanjakan oleh pemerintah akan lebih baik apabila digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

### 2.2.3 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana perimbangan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, Bastian (2003:84). Sedangkan menurut Rosjidi (2001:87) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai keseluruhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan pada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat, daerah dan antar daerah, Sidik et al (2002).

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN (UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah). Penerimaan dalam negeri adalah penerimaan Negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi penerimaan Negara yang dibagihasikan kepada daerah, Widjaja (2007;138). Dana alokasi umum terdiri dari:

- 1) Dana alokasi umum untuk daerah propinsi
- 2) Dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota

Dana alokasi umum diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerahnya. Penelitian Abdullah dan Halim (2003), menunjukkan kecenderungan yang sama dimana daerah lebih mengandalkan penerimaan DAU daripada PAD untuk kepentingan pembiayaan daerah. Perilaku belanja daerah lebih ditentukan oleh besar-kecilnya DAU daripada PAD, karena sumber daya alam di setiap daerah berbeda sehingga tidak semua daerah bisa memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang memiliki sumber daya alam sedikit.

Beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD, Adi (2006). Menurut Widjaja (2007;47) dana alokasi umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintah di daerah. Adanya transfer dana dana alokasi umum bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri, yaitu pendapatan asli daerah, Prakosa (2004).

Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Pengertian lain, dana alokasi umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada, Simanjuntak (2006). Pengalokasian dana alokasi umum lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil.

Tujuan alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia, Situngkir (2009). Menurut Darwanto (2007) terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih

baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Apabila pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya dengan baik dan dapat menggunakan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat dengan baik dan melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, maka bukan tidak mungkin kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi dan pertumbuhan ekonomi dapat mengalami peningkatan

#### 2.2.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2007;96) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

- 1) Pajak daerah,
- 2) Retribusi daerah,
- 3) Hasil perusahaan milik daerah,
- 4) Lain-lain PAD yang sah

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak provinsi terdiri dari:
  - a. pajak kendaraan bermotor,
  - b. bea balik nama kendaraan bermotor,

- c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
- d. pajak air permukaan dan
- e. pajak rokok.

2. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a. pajak hotel,
- b. pajak restoran,
- c. pajak hiburan,
- d. pajak reklame,
- e. pajak penerangan jalan,
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan,
- g. pajak parkir,
- h. pajak air tanah,
- i. pajak sarang burung walis,
- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Undang-Undang No. 28 tahun 2009). Pemungutan retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Besarnya retribusi seharusnya (lebih kurang) sama dengan nilai layanan yang diberikan, Mardiasmo (2004:141) Penerimaan retribusi daerah ini meliputi :

a. Retribusi jasa umum

Pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Misalnya: retribusi pelayanan kesehatan, persampahan, akta catatan sipil, KTP.

b. Retribusi jasa usaha

Pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta dan atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan misalnya: retribusi pasar grosir, terminal, rumah potong hewan, pelayanan kepelabuhan, tempat rekreasi dan olahraga, penyeberangan di air dan penjualan produksi usaha daerah..

c. Retribusi perizinan tertentu

Pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas pemberian ijin untuk melakukan kegiatan tertentu yang perlu dikendalikan oleh daerah misalnya: izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan dan izin usaha perikanan.

Menurut Halim (2007;98) hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, Halim (2007;98). Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro dan pendapatan bunga
- c. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah serta penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap uang asing
- d. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, failitas social dan umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

Pendapatan asli daerah secara berkelanjutan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu, Bati (2009). Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik. Peningkatan pendapatan asli daerah sebenarnya merupakan eksese dari pertumbuhan ekonomi. Sidik et al (2002) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Penerimaan yang menjadi andalan pendapatan asli daerah adalah retribusi dan pajak daerah. Tingginya retribusi bisa jadi merupakan indikasi semakin tingginya niat pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan berkualitas. Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya, Harianto (2007). Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Adi (2006).

Penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah. Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah, Putro (2010). Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Di sini terlihat jelas apabila kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah telah memenuhi standar yang diinginkan masyarakat, maka masyarakat akan lebih merasa nyaman dalam menggunakan fasilitas tersebut dan secara otomatis pendapatan asli daerah akan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Besarnya pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, pembangunan fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran Maimunah (2009). Hal yang dilakukan dalam kaitannya dengan belanja modal, akan terus diupayakan peningkatan penyertaan modal pada beberapa badan usaha milik daerah agar pada gilirannya dapat menghasilkan peningkatan pendapatan asli daerah.

#### 2.2.5 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita memang bukan merupakan satu-satunya tolak ukur untuk menilai tingkat kemakmuran suatu bangsa atau kesejahteraan rakyat sebuah Negara. Bahkan, dalam lingkup yang lebih sempit lagi, ia pun belum merupakan ukuran yang memadai ditinjau hanya dari aspek pendapatan. Sebagaimana diketahui, pendapatan per kapita adalah sebuah konsep rata-rata, belum menghiraukan distribusinya di kalangan penduduk.

Penilaian kesejahteraan penduduk sebuah negeri tidak cukup hanya dengan melihat besar kecilnya pendapatan per kapita, tapi harus pula memperhatikan distribusi pendapatan itu dikalangan penduduk, Dumairy (1996:44). Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai

kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik, Harianto (2007).

Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, Harianto (2007). Pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita.

Semakin tinggi pendapatan per kapita, memberikan indikasi semakin tingginya tingkat pembangunan suatu daerah, Harianto (2007). Kesenjangan pendapatan per kapita masih sangat tinggi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya adalah banyaknya atau sedikitnya lapangan pekerjaan, perbedaan UMR tiap daerah, dan tingkat kemajuan dari daerah itu sendiri.

Pendapatan per kapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka yang digunakan semestinya adalah total pendapatan regional dibagi jumlah penduduk regional dibagi jumlah penduduk. Akan tetapi, angka ini seringkali tidak diperoleh sehingga diganti dengan total PDRB atas harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk. Angka pendapatan per kapita dapat dinyatakan dalam harga berlaku maupun dalam harga konstan tergantung pada kebutuhan, Tarigan (2005:21). Menurut Alam (2001:23) sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat

kemakmuran penduduk suatu Negara, pendapatan per kapita dihitung secara berkala (periodik), biasanya satu tahun.

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Pembangunan**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerahnya. Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar, Christy (2009).

Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD, Sidik et al, (2002). Penelitian Abdullah dan Halim (2003), menunjukkan kecenderungan yang sama dimana daerah lebih mengandalkan penerimaan DAU daripada PAD untuk kepentingan pembiayaan daerah. Perilaku belanja daerah lebih ditentukan oleh besar-kecilnya DAU daripada PAD. Prakosa (2004) serta Harianto (2007) memberikan fakta empirik yang sama dimana DAU mempunyai pengaruh positif

terhadap belanja modal pemerintah daerah. Dari gambaran teori ini, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Pembangunan.

### 2.3.2 Hubungan Belanja Pembangunan dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Belanja yang mengakibatkan penambahan kekayaan (aset) adalah belanja modal, Bastian (2003;86). Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD.

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Menurut Bati (2006), dengan adanya belanja modal yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Senada dengan Harianto (2007) yang mengatakan bahwa tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dari gambaran teori ini, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2 : Belanja Pembangunan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

### 2.3.3 Hubungan Belanja Pembangunan dengan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004:73), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Peningkatan pemerintah daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Terkait dengan PAD, penerimaan yang menjadi andalan adalah retribusi dan pajak daerah. Tingginya retribusi bisa jadi merupakan indikasi semakin tingginya niat pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Bati (2009) mengatakan dengan adanya belanja modal yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Di sini terlihat jelas apabila kualitas pelayanan publik telah memenuhi standar yang diinginkan masyarakat, maka masyarakat akan lebih nyaman menggunakan fasilitas tersebut dan secara otomatis pendapatan asli daerah akan meningkat.

Besarnya pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil

pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran, Maimunah (2009). Hal yang dilakukan dalam kaitannya dengan pembiayaan adalah akan terus diupayakan peningkatan penyertaan modal pada beberapa badan usaha milik daerah agar dapat menghasilkan peningkatan pendapatan asli daerah. Dari gambaran teori ini, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

H3 : Belanja Pembangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

#### 2.3.4 Hubungan Belanja Pembangunan dengan Pendapatan Per Kapita

Belanja pembangunan (modal) merupakan pengeluaran untuk perolehan aset dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk :

1. Belanja tanah,
2. Belanja Peralatan dan mesin,
3. Belanja modal gedung dan bangunan,
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan,
5. Belanja aset tetap lainnya,
6. Belanja aset lainnya

Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya, Harianto

(2007). Alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktifitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita.

Setelah pemerintah daerah berhasil memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana publik dengan efektif maka hal ini akan secara otomatis meningkatkan pendapatan per kapita. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari gambaran teori ini, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

H4 : Belanja Pembangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita

### 2.3.5 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Per Kapita

Pendapatan asli daerah secara berkelanjutan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu, Bati (2009). Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik. Peningkatan pendapatan asli daerah sebenarnya merupakan eksis dari pertumbuhan ekonomi.

Sidik et al (2002) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Simanjuntak (2006) ada dua cara untuk mengupayakan

peningkatan pendapatan asli daerah secara maksimal yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek retribusi atau pajak ataupun menjangkau wajib pajak baru.

Besarnya pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan kata lain, pembangunan fasilitas sektor publik akan meningkatkan produktifitas masyarakat dan akan berujung pada peningkatan pendapatan asli daerah dan secara tidak langsung pendapatan per kapita juga akan mengalami peningkatan. Dari gambaran teori ini, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

H5 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita.

#### 2.3.6 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Per Kapita

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini berhubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan pada setiap tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi harus lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk, agar peningkatan pendapatan per kapita dapat tercapai.

Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, Harianto (2007). Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan per kapita, memberikan gambaran semakin tingginya tingkat pembangunan suatu daerah.

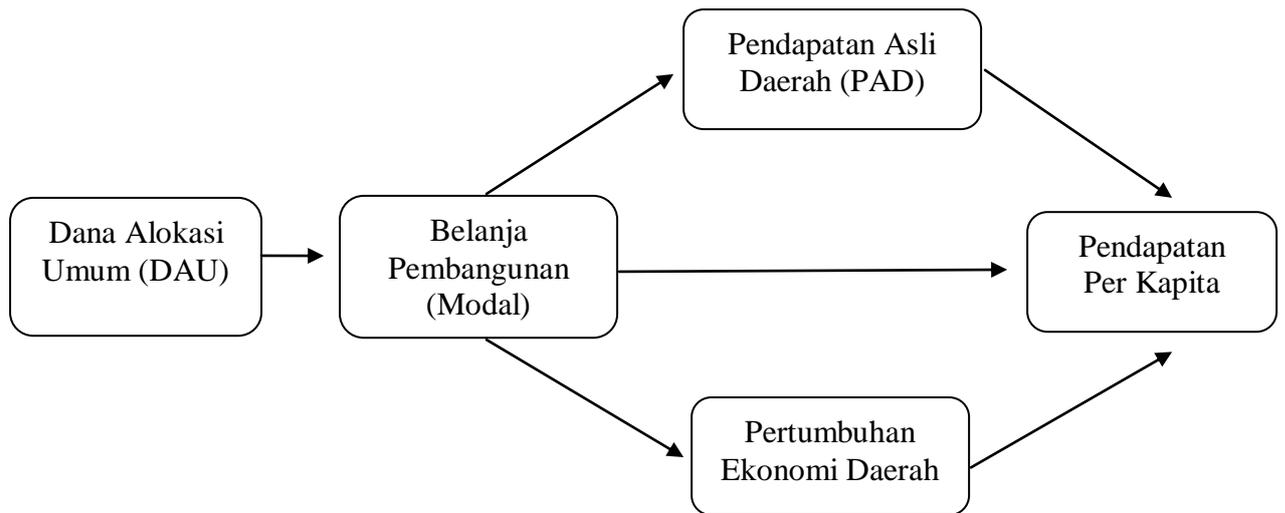
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, Sularso (2011). Meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya. Pendapatan per kapita adalah total PDRB atas harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk. Angka pendapatan per kapita dapat dinyatakan dalam harga berlaku maupun dalam harga konstan tergantung pada kebutuhan, Tarigan (2005;21). Dari gambaran teori ini, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

H6 : Pertumbuhan Ekonomi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Per Kapita.

#### **2.4 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual sepenuhnya hasil dari pemikiran peneliti setelah mengkaji tentang permasalahan peneliti yang akan diteliti, tujuan yang akan dicapai serta kajian pustaka sebagai dasar logika untuk mencari jawaban dari masalah tersebut.

Dari hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini, maka diperoleh gambaran mengenai hubungan antar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Hubungan ini ditunjukkan dengan kerangka konseptual pada gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1

Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita

Dalam alur kerangka konsep di atas terdapat lima variabel yang saling berhubungan, yaitu dana alokasi umum, belanja pembangunan, pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antar kelima variabel tersebut, maka peneliti menggunakan uji regresi sederhana dan uji hipotesis.